

**ANALISIS PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)  
DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK DI  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Penulis

Nama : Jazlyn Ineza

NPM : 2416041078

P.S : Ilmu Administrasi Negara

Mata Kuliah : Metode Penelitian Administrasi Publik

Dosen : Prof. Intan Fitri Meutia, S.An.,M.A.,Ph.D.



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**3 SEPTEMBER 2025**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan publik merupakan keputusan, tindakan, maupun program yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatasi permasalahan yang dihadapi secara kolektif. Melalui kebijakan publik, pemerintah berupaya menciptakan keteraturan sosial, menyediakan layanan dasar, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Tanpa adanya kebijakan publik yang tepat dan responsif, pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup akan sulit tercapai. Kebijakan publik memiliki peran penting dan tidak hanya sebagai aturan formal, melainkan juga sebagai pedoman nyata yang menentukan seberapa jauh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan, keadilan sosial, dan jaminan terhadap hak-hak dasar mereka (Dewi, 2022).

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan mekanisme penting yang bertujuan memastikan agar setiap kebijakan benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan tidak hanya sebatas memantau jalannya pelaksanaan, melainkan juga melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan sehingga arah kebijakan tetap konsisten dengan rencana yang telah dirumuskan. Pengawasan mencakup upaya memperbaiki dan meluruskan pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengawasan adalah proses sistematis untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar, norma, atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sururama & Amalia, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan memiliki peranan strategis dalam menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kebijakan publik, sekaligus memastikan bahwa manfaat kebijakan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Prinsip *good governance* menjadi landasan penting dalam proses pengawasan kebijakan publik agar pelaksanaannya benar-benar sejalan dengan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas menuntut setiap lembaga pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya melalui mekanisme evaluasi dan pelaporan yang jelas, sehingga hasil kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Transparansi menekankan keterbukaan informasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisasi. Partisipasi masyarakat memberikan ruang bagi warga untuk terlibat aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, sehingga setiap keputusan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan (Moenek & Suwanda, 2019). Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan memperkuat efektivitas pengawasan, sehingga kebijakan publik tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki kedudukan yang penting untuk masyarakat sipil karena berfungsi melakukan pengawasan, menyuarakan aspirasi, serta menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Peran LSM tidak hanya mengawasi jalannya kebijakan publik, tetapi juga memastikan agar setiap kebijakan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam proses pembangunan, LSM berperan sebagai representasi dari kekuatan masyarakat sipil yang berusaha memberikan masukan kritis, memperjuangkan hak-hak warga, serta mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dari pihak pemerintah. Menurut Herdiansah & Randi (2016), LSM mempunyai peranan penting dalam menjembatani kepentingan rakyat, melakukan advokasi, serta memberikan pendampingan bagi masyarakat, sehingga keberadaannya sangat relevan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam mendukung proses demokrasi di tingkat lokal, termasuk di Kota Bandar Lampung. Peran tersebut dapat dilihat dari kegiatan advokasi yang dilakukan untuk mengawasi jalannya program pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan dan tata ruang kota. Sebagai contoh Di Kota Bandar Lampung, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut berperan dalam pengawasan kebijakan lingkungan. Berdasarkan penelitian dari Iskandar (2016), kontribusi LSM dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan, disebutkan bahwa LSM bertindak sebagai mitra yang penting dalam mendukung upaya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Mereka aktif memberikan masukan kepada pemerintah daerah, termasuk Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH), terutama terkait pelaksanaan Perda dan pengawasan lapangan seperti pengelolaan sumber daya alam serta pengelolaan kawasan kritis yang menyangkut kelestarian lingkungan setempat.

Kebijakan publik yang dijalankan Pemerintah Kota Bandar Lampung mencakup berbagai sektor, mulai dari tata ruang kota, pendidikan, lingkungan, hingga pelayanan publik. Pemerintah kota dalam bidang pendidikan menerapkan kebijakan zonasi sekolah menengah pertama dengan tujuan pemerataan akses belajar bagi pelajar. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi hambatan. Hasil penelitian dari Kurniawan et al (2024) menunjukkan bahwa kualitas sekolah dan distribusi sarana pendidikan belum seimbang, sehingga terjadi ketidakmerataan akses bagi masyarakat di wilayah tertentu. Sistem pendaftaran berbasis daring yang diterapkan pemerintah juga sering mengalami kendala teknis, yang pada akhirnya menimbulkan keluhan dari masyarakat dan memperlihatkan perlunya evaluasi kebijakan secara menyeluruh agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai dengan lebih optimal.

Di bidang tata ruang kota, Kota Bandar Lampung masih menghadapi tantangan signifikan dalam penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Menurut

Rilansari et al., (2025), luas RTH di Bandar Lampung tercatat hanya sekitar 7,73% dari total wilayah kota jauh di bawah standar minimum nasional sebesar 30% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang. Kesenjangan tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan tata ruang, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pesatnya perkembangan urbanisasi di Bandar Lampung belum diimbangi dengan perencanaan lingkungan yang berkelanjutan. Minimnya ketersediaan RTH berimplikasi pada berkurangnya kualitas udara, meningkatnya suhu permukaan kota, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap ruang publik yang sehat dan layak. Kondisi ini semakin mendesak mengingat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi perkotaan yang terus meningkat, sehingga tanpa adanya kebijakan yang lebih tegas dan terarah, risiko kerusakan lingkungan akan semakin besar. Diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas RTH melalui strategi kolaboratif, baik dengan melibatkan sektor swasta maupun partisipasi masyarakat, agar pembangunan kota dapat berlangsung selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah daerah telah menginisiasi berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan masih tergolong minim. Sebagai contoh, partisipasi masyarakat pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kangkung mengungkap bahwa masyarakat hanya berada pada tahap "informing" hanya menerima informasi tanpa diberi ruang untuk memberikan masukan atau mengambil keputusan. Hal ini menandakan masih lemahnya keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan yang seharusnya bersifat partisipatif (Sinamo, 2022).

Selain itu, kendala tidak hanya terjadi pada aspek partisipasi, tetapi juga implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya beberapa hambatan nyata: mulai dari kurangnya tenaga ahli, minimnya

sosialisasi program, terbatasnya sarana dan prasarana, hingga kurangnya kontrol organisasi yang efektif. Kombinasi dari isu-isu ini memperlihatkan bahwa meski peraturan telah ditetapkan, praktik di lapangan masih menemui berbagai kendala yang mengaburkan tujuan kebijakan tersebut (Setianingsih & Ardiansyah, 2024).

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung tahun 2019–2021 menunjukkan kinerja keuangan daerah yang belum optimal. Rasio kemandirian keuangan daerah hanya mencapai 36–40 % dalam tiga tahun tersebut, menggambarkan tingginya ketergantungan terhadap dana pusat. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terbilang kurang efektif hanya mencapai 64 % pada 2019, dan menurun menjadi 41 %–50 % pada tahun selanjutnya. Rasio efisiensi keuangan daerah yang berada di bawah 100 % menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pemerintah belum dilakukan secara efisien (Salsabilla & Alam, 2023). Kondisi ini mencerminkan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan masih lemahnya transparansi anggaran publik di Kota Bandar Lampung.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal maupun nasional memiliki peran signifikan dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan publik di Kota Bandar Lampung. Salah satu contohnya adalah WALHI Lampung sebuah LSM lingkungan yang secara aktif melakukan pemantauan kondisi lingkungan dan menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan publik. Keterlibatan WALHI ini penting karena LSM sering mampu menghasilkan data independen yang lebih akurat daripada data resmi pemerintah, terlebih dalam menjalankan fungsi pengawasan secara aktif di lapangan. Namun demikian, aspek kolaborasi dengan masyarakat masih perlu diperkuat agar advokasi yang dilakukan tidak hanya berjalan dari atas ke bawah, tetapi tumbuh dari partisipasi warga secara menyeluruh

Peran LSM juga terlihat dalam pengawasan terhadap kebijakan inovatif, misalnya pengelolaan sampah di kawasan pesisir Bandar Lampung. WALHI bersama komunitas lokal ikut mengawal jalannya program bank sampah di wilayah pesisir seperti Kelurahan Sukaraja (Efendi et al., 2019). Program ini memang terbukti mampu menekan jumlah sampah, namun masih menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan pengawasan dari pemerintah, ketiadaan prosedur operasional standar, serta ketidakseimbangan sumber daya manusia yang mendukung. Kondisi ini menegaskan bahwa kekompakan antara pemerintah, masyarakat, dan LSM sangat diperlukan agar kebijakan pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir dapat berjalan lebih optimal

Pembangunan pesisir Kota Bandar Lampung, keberadaan LSM seperti WALHI juga terlihat dalam peran mereka sebagai komisioner Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap proyek Waterfront City. Mereka tidak hanya menilai kelayakan lingkungan dan menyampaikan rekomendasi berbasis data, tetapi juga berupaya memastikan bahwa aspek lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan (Efendi et al., 2019). Meski demikian, penelitian mencatat bahwa perannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu dalam proses pembahasan, minimnya observasi langsung di lokasi, serta kurang responsifnya pihak pemerintah terhadap masukan yang disampaikan

Meskipun peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik cukup menonjol, efektivitas peran tersebut masih patut dipertanyakan. Surat keterangan terealisasi dari berbagai aktivitas advokasi LSM seringkali dibayangi oleh keterbatasan sumber daya. Misalnya, LSM di Indonesia termasuk di daerah masih sangat tergantung pada dana hibah dari donor internasional, dengan sekitar 70 % ketergantungan terhadap dana tersebut, yang sifatnya tidak menentu dan membatasi kemampuan mereka menjalankan program yang lebih luas (Widayanti, 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kegiatan LSM benar-benar

berkelanjutan dan berdampak, atau hanya proyek jangka pendek yang tergantung dana eksternal.

Suara kritis LSM sering kali menghadapi berbagai kendala bukan hanya hambatan material, tetapi juga politis. Selain mendongkrak partisipasi masyarakat, LSM juga menghadapi resistensi langsung atau tidak langsung dari pemerintah atau kelompok berkepentingan. Hal ini mencakup tekanan terselubung yang menghambat keterlibatan efektif mereka. Kesenjangan dalam akses informasi, lemahnya sosialisasi, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah juga memperlemah posisi LSM sebagai pengawas kebijakan yang kredibel. Situasi ini memunculkan pertanyaan bagaimana LSM dapat meningkatkan daya tawar dan pengaruhnya dalam konteks lokal jika kerangka kelembagaan dan lingkungan politik tidak mendukung.

Pentingnya penelitian terhadap peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengawasi kebijakan publik di Bandar Lampung karena LSM memiliki posisi strategis sebagai aktor non-pemerintah yang dapat mengawal jalannya pemerintahan agar tetap transparan dan akuntabel. Keberadaan LSM dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, terutama dalam menyuarakan aspirasi publik sekaligus mengawasi potensi penyimpangan dalam implementasi kebijakan. Efektivitas peran LSM dalam mendorong good governance sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam membangun relasi dengan masyarakat serta memperkuat mekanisme kontrol terhadap pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, penelitian ini sekaligus mendesak dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana LSM di Bandar Lampung mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik secara nyata.

Secara teoritis, konsep good governance terutama akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai komponen penting dalam sistem pemerintahan yang sehat. Transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi pengelolaan keuangan publik

dalam mewujudkan good governance, sementara partisipasi masyarakat perlu diperkuat agar memiliki dampak nyata.

Prinsip-prinsip ini sejajar dengan posisi teoritis LSM sebagai aktor masyarakat sipil yang mampu mengisi ruang pengawasan, menyuarakan aspirasi publik, dan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan. Secara empiris, berbagai LSM di Bandar Lampung seperti WALHI Lampung, LBH Bandar Lampung, dan Mitra Bentala memiliki peran aktif dalam advokasi yang menyentuh ranah lingkungan, hukum, dan pemberdayaan warga. Namun, efektivitas kontribusi mereka masih menjadi pertanyaan. Walaupun mereka secara konsisten bergerak dalam isu-isu strategis seperti pelestarian ruang terbuka hijau (RTH) dan advokasi kebijakan, studi-studi lapangan menemukan adanya keterbatasan misalnya sumber daya, dukungan politik, ataupun partisipasi masyarakat yang minim yang menghambat pengaruh mereka terhadap perubahan kebijakan nyata. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam efektivitas peran LSM di Bandar Lampung agar dapat memberikan rekomendasi pembangunan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam dinamika peran LSM dalam mengawasi kebijakan publik di Bandar Lampung, termasuk strategi yang dijalankan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini relevan sebab fokus penelitian tidak hanya pada angka atau data statistik, tetapi pada pemahaman terhadap praktik, interaksi, dan konteks sosial-politik yang melingkupi aktivitas LSM. Dengan demikian, metode kualitatif dipandang paling tepat untuk memperoleh gambaran nyata mengenai efektivitas dan kontribusi LSM dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas kebijakan publik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting dalam pengawasan kebijakan publik. Salah satu penelitian yang relevan adalah studi kasus LSM DAMAR di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menganalisis dinamika LSM dalam legislasi kebijakan responsif gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM DAMAR berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan yang responsif terhadap gender di tingkat lokal (Ma'arif, 2017).

Penelitian mengenai pemberdayaan komunitas oleh LSM Mitra Bentala Bandar Lampung, juga menunjukkan bahwa LSM memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program lingkungan (Rilansari et al., 2025). Meskipun penelitian spesifik mengenai peran LSM di Bandar Lampung masih terbatas, beberapa studi menunjukkan bahwa LSM memiliki peran penting dalam pengawasan dan pemberdayaan masyarakat, serta dapat mempengaruhi kebijakan publik di tingkat lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada analisis efektivitas peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Bandar Lampung dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, dengan memperhatikan hambatan sumber daya, resistensi politik, serta tingkat keterlibatan warga yang masih terbatas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

LSM di Kota Bandar Lampung berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, efektivitasnya masih belum optimal karena terbatasnya sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta adanya resistensi politik. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran LSM di Kota Bandar Lampung dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi LSM dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik di Kota Bandar Lampung?

### **1.3 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik di Kota Bandar Lampung serta mengungkap hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

### **1.4 Manfaat**

#### **1. Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan ilmu sosial politik, khususnya mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik tentang bagaimana prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat diimplementasikan melalui pengawasan yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah.

#### **2. Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah, LSM, maupun masyarakat di Kota Bandar Lampung. Bagi pemerintah, hasil penelitian dapat menjadi masukan berharga untuk memperbaiki mekanisme pengawasan, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta membangun sistem kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bagi LSM, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dalam memperkuat kapasitas organisasi, menyusun strategi advokasi yang lebih efektif, serta memperluas kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu mendorong kesadaran kritis dan partisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan publik, sehingga tercipta pola hubungan yang lebih seimbang antara pemerintah, LSM, dan warga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Penerbit Samudra Biru. Yogyakarta.
- Efendi, H. N., Yulianto, Y., & Prihantika, I. (2019). Dinamika Peran Civil Society Dalam Ruang Publik: Studi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 1(1), 19–28.
- Herdiansah, A. G., & Randi. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Indonesia. *Sosio-global Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49–67.
- Iskandar, A. (2016). Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (Studi Pada Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung). *Jurnal Keadilan Progresif*, 7(1), 78–90.
- Kurniawan, A. F., Sulistio, E. B., & Karmilasari, V. (2024). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Optimalisasi Aksesibilitas Pendidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Di Kota Bandar Lampung. *Wacana Publik*, 18(1), 43–52.
- Ma'arif, S. (2017). Dinamika Lsm Dalam Legislasi Kebijakan Responsif Gender: Studi Kasus Lsm Damar Di Kota Bandar Lampung. *Natapraja*, 5(2), 185–199.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaam Keuangan Daerah*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rilansari, V., Rahmah, C., Rajabi, M. F., & Saputra, M. G. D. (2025). Penentuan Kawasan Potensial Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Kerapatan Vegetasi Normalized Difference Vegetation Index ( Ndvi ) Dan Indeks Kenyamanan

Temperature Humidity Index ( Thi ) Di Kota Bandar Lampung  
Determination Of Potential Green Open Space Area. *Desa-Kota: Jurnal  
Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Permukiman*, 7(2), 140–148.

Salsabilla, R. V., & Alam, I. A. (2023). Penilaian Akuntabilitas Keuangan Sektor  
Publik Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.  
*Jurnal Emt Kita*, 7(4), 1149–1156.

Setianingsih, F. N., & Ardiansyah, M. (2024). Implementasi Kebijakan  
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung (Studi Pada  
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(4),  
1–11.

Sinamo, H. A. B. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan  
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Kangkung, Kota  
Bandar Lampung. *Jurnal Plano Buana*, 2(2), 77–86.

Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Cendekia Press.  
Bandung.

Widayanti, F. (2025). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam  
Mendorong Partisipasi Politik Di Komunitas Lokal. *Jurnal Sociopolitico*,  
7(1), 83–88.